

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	30
1.3. Tujuan Penelitian	30
1.4. Manfaat Penulisan.	31
1.5. Orisinalitas/ Keaslian Penelitian.....	32
1.6. Sistematika penulisan.	37
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA.....	40
2.1. Landasan Teori	40
2.1.1. Teori Tiga Nilai Dasar Hukum	41
2.1.1.1. Aspek Keadilan	42
2.1.1.2. Aspek Kemanfaatan	43
2.1.1.3. Aspek Kepastian Hukum.....	44
2.1.2. Teori Badan Hukum.....	54
2.2. Landasan Konseptual.....	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	68
3.1. Jenis dan Tipe Penelitian	68
3.2. Sumber Data	72
3.3. Metode Pengumpulan Data	76
3.4. Metode Analisis Data	78
3.5. Hambatan Penelitian.....	79
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	80
4.1. Pengaturan Mengenai Status dan Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah (Perusda) dalam Tatahan Hukum di Indonesia.....	80
4.1.1. Badan Usaha yang Berbadan Hukum Sebagai Subjek Hukum.	80
4.1.2. Pengertian dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah	86
4.1.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah	86
4.1.2.2. Syarat-syarat Pendirian Badan Usaha Milik Daerah.....	89
4.1.2.3. Modal Badan Usaha Milik Daerah.....	94
4.1.2.4. Organ Badan Usaha Milik Daerah	101
4.1.3. Kedudukan dan Hubungan BUMD dengan Pemerintah Daerah	115
4.1.4. Pengaturan BUMD yang Berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	120

4.1.5. Karakteristik Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	125
4.1.6. Problematika Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (Perusda) Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	127
4.1.7. Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).....	132
4.2. Implementasi Pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) di Indonesia.....	144
4.2.1. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (Perusda) BPR Dati II Klaten Menjadi PT. BPR Bank Klaten (Perseroda)	144
4.2.1.1. Prosedur Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah (Perusda) Bank BPR Klaten Menjadi PT. BPR Bank Klaten (Perseroda).....	148
4.2.1.2. Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	154
4.2.2. Kinerja PT BPR Bank Klaten (Perseroda).....	169
4.2.2.1. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Belum Mampu Memberikan Kontribusi yang Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	174
4.2.2.2. Adanya Intervensi Pemerintah Daerah yang Berkaitan dengan Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).....	176
4.2.2.3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Merupakan Bagian Dari Investasi Dalam Bentuk Penyertaan Modal Kedalam Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).....	178
4.2.2.3.1. Sumber Penyertaan Modal Pemerintah Daerah...	178
4.2.2.3.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke dalam Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Merupakan Upaya Guna Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	183
4.2.3. Perbandingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	185
4.2.3.1. PT. BPR Cipatujah Jabar (Perseroda) yang Bergerak dalam Bidang Perbankan	187
4.2.3.2. PT. Jaswita Jabar (Perseroda) yang Bergerak dalam Bidang Jasa	194
4.2.3.3. PT. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda) yang Bergerak Dalam Bidang Transportasi	198
4.2.3.4. Hasil Studi Perbandingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).....	207

4.2.3.5. Pembelajaran Dari Hasil Studi Perbandingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap PT. BPR Bank Klaten (Perseroda).....	213
4.3. Pengaturan Yang Ideal Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Sebagai BUMD Yang Berorientasi Profit.....	216
4.3.1. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang Bertujuan Meningkatkan Profit.....	220
4.3.1.1. Pengaturan Good Corporate Governance di Indonesia	221
4.3.1.2. Kebijakan dan Upaya Perseroda Dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	230
4.3.1.3. Penguatan Komitmen Bersama Organ Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) untuk Meningkatkan Kinerja dan Profit.	234
4.3.1.4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	240
4.3.2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Berorientasi Profit yang Ideal di Indonesia.....	245
4.3.2.1. Meningkatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Mendorong Perkembangan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)	245
4.3.2.2. Meningkatkan Peran Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	246
4.3.3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Ketentuan Hukum Pengelolaan Perseroan Daerah Sebagai BUMD.....	252
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	258
5.1. Kesimpulan.....	258
5.2. Saran	259